



**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN DALAM PENINGKATAN
PERTUMBUHAN EKONOMI
Pemerintah Kabupaten
Simalungun Diprovinsi
Sumatera Utara**

SKRIPSI

Dijukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

MARTEA AMELITA BR SITEPU
NPM1515100287

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MARTEA AMELITA BR SITEPU
NPM : 1515100287
PROGRAM STUDI : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENDAPATAN ASLI
DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN DALAM
MENINGKATKAN
PERTUMBUHAN EKONOMI
PEMERINTAH KABUPATEN
SIMALUNGUN DI PROVINSI
SUMATERA UTARA

MEDAN, JULI 2020

KETUA PROGRAM STUDI

(Junawan, S.E., M.Si)

DEKAN



(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum)

PEMBIMBING I

(Fitri Yani Paanggabean, S.E., M.Si)

PEMBIMBING II

(Oktarini Khamila Siregar, S.E., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA	: MARTEA AMELITA BR SITEPU
NPM	: 1515100287
PROGRAM STUDI	: AKUNTANSI
JENJANG	: S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI	: ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

MEDAN, JULI 2020

KETUA

(Junawan, S.E., M.Si)

ANGGOTA I

(Ritri Yaul Panggabean, S.E., M.Si)

ANGGOTA II

(Oktariai Lhamila Siregar, S.E., M.Si)

ANGGOTA III

(Rusyda Nazhira Yuzris S.S., M.Si)

ANGGOTA IV

(Hernawaty, S.E., MM)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARTEA AMELITA BR SITEPU
NPM : 1515100287
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAN DANA PERIMBANGAN DALAM
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN
EKONOMI PEMERINTAH KABUPATEN
SIMALUNGUN.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, November 2019



MarteA Amelta Br Sitepu

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARTEA AMELITA BRSITEPU
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 20 Maret 1997
NPM : 1515100287
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Dsn. 1 Nangka Lima Desa, Raja tengah, Kec.
Kuala, Kab. Langkat

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, November 2019
Yang membuat pernyataan



Martea Amelita Br Sitepu



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax: 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : marte melita br sitepu
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 20 Maret 1997
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100287
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 140 SKS, IPK 3.31
 Nomor Hp : 085277494745
 dan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

Analisis pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi pemerintah kabupaten di provinsi sumatra utara

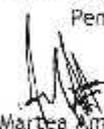
Ditulis Oleh: Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Tanggal Tidak Perlu

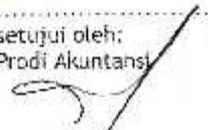

 Rektor I,
 (Ir. Bliakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

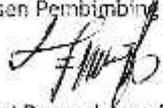
Medan, 06 Maret 2019

Pemohon,


 (Marte Melita Br Sitepu)

Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)
 Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Akuntansi

 (Anesi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal : 05/03/2019
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Fitri Yanti Panggabean, SE., M.Si)
 Tanggal : 13/3/2019
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II :

 (Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si)

No. Dokumen: FM-UPBM/18-02

Revisi: 0

Igl. Eff: 22 Oktober 2018



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
 Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Fitri Yani Panggabean, SE, M.Si
 Dosen Pembimbing II : Okearini Khamila, SE, M.Si
 Nama Mahasiswa : MARTEA AMELITA BR SITEPU
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100287
 Tingkat Pendidikan : Strata I
 Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan
 Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah
 Kabupaten Simalungur di Provinsi Sumatera Utara.

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
11-19	Perbaiki penulisan kalimat di kata pengantar, bab 1 sp 5, penomoran di bab 1 sp 5, jadwal selesai skripsi sesuai bulannya. U tabel dan gambar dituat sumber tahunnya.	<i>[Signature]</i>	
11-19	Perbaiki Abstrak, Daftar Pustaka, Kesimpulan, Bab yg kurang dan lebih diper hatikan ACC y sedang mja Hare.	<i>[Signature]</i>	

Dosen Pembimbing II
[Signature]
 Okearini Khamila, SE, M.Si

Medan, 15 November 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

Dr. Surya Nita, S.P., M.Hum.
 DEKAN
 FAKULTAS SOSIAL SAINS



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: ungap@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Fitri Yani, Pasogalbean, SE, M.Si.
 Dosen Pembimbing II : Okhanni Khamidi, SE, M.Si.
 Nama Mahasiswa : MARTEA AMELITA BR SITEPU
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100287
 Jenjang Pendidikan : Sarjana I
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Pelembagaan
 Dalam Meningkatkan Perumbuhan Ekonomi Pemerintah
 Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara

TANGGAL	PEBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
26/10-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Servisakan latar belakang, Rumusan masalah, tinjauan pustaka (teori) Metode → Sampai pd kimpulan dan saran. - Teori Akuntansi yg di kump - Daftar pustaka - Pola lampiran 	<i>[Signature]</i>	
	<p>Ace Sidang Skripsi</p> <p><i>[Signature]</i> 04/10/2019</p> <p>(Ace Pessyral)</p>		

Medan, 26 Oktober 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



Telah Diperiksa oleh LPMU
 dengan Plagiarisme... 26 %
 Medan, 27 November 2019
 Ka. LPMU
 Cahyo Pramono, SE, MM

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 27 November 2019
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Telah di terima
 berkas persyaratan
 dapat di proses
 Medan, 28/11/2019
 Ka. BPAA
 an. *Arif*
 TRUSMI WAHYONO, SE, MM.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARTEA AMELITA BR SITEPU
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 20 Maret 1997
 Nama Orang Tua : repelita sitepu
 N. P. M : 1515100287
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 085277494745
 Alamat : Desa Raja Tengah Dusun I Nangka V

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon ditertibkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Tertampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Tertampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Tertampir foto copy STTB SITA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Tertampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 3 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Ierlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000
UK.T.50%	Kp.	2.625.000

Total : Rp. 4.725.000 *dp* 28/11-19

Periode Wisuda Ke : **64**

Ukuran Toga : **M**



Diketahui/Disetujui oleh
 Dr. Surli Nita, S.H., M.Hum.
 Dekan Fakultas Sosial Sains

Hormat saya
Arif
 MARTEA AMELITA BR SITEPU
 1515100287

catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk : Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs. ybs.



TANDA BEBAS PUSTAKA
 No. 1257 / PEP / BP / 2019
 Dinyatakan tidak ada sangkut pautnya dengan UPT Perpustakaan
27 NOV 2019
 Perpustakaan
 Nanda Kharidah S.P.

Plagiarism Detector v. 1281 - Originality Report

Analyzed document: 19/11/2019 10:39:55

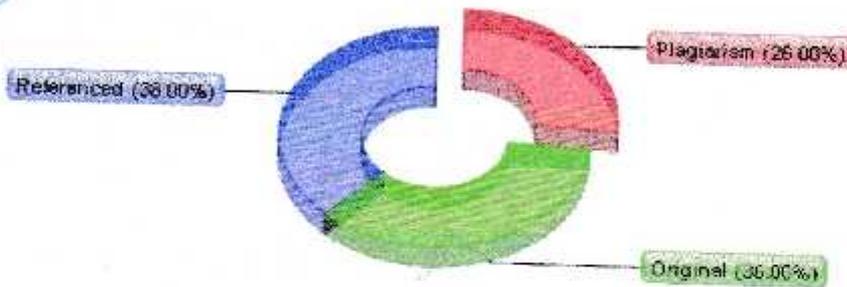
"MARTEA AMELITA BR SITEPU_1515100287_AKUNTANSI.docx"

Check Type: Internet - via Google and Bing

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License2



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- 90 wrds: 11139 <http://lib.ums.ac.id/17639/1/7211409047.pdf>
- 81 wrds: 10123 <https://id.123dok.com/document/z1f53rvq-pengaruh-pendapatan-asli-daerah-pad-dana...>
- 45 wrds: 5589 <https://luk.staff.ugm.ac.id/aturl/U033-2004PerimbanganKeuanganLengkap.pdf>

Other Sources:]

Processed resources details:

144 - Ok / 27 - Failed

Other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:





Handwritten signature and date: 27/20/17

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN DALAM PENINGKATAN
PERTUMBUHAN EKONOMI
PEMERINTAH KABUPATEN
SIMALUNGUN DIPROVINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

MARTEA AMELITA BR SITEPU
NPM.1515100287

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 PO.BOX.1099 Telp. (061) 8455571 Medan
Email : fasosa@pancabudi.ac.id <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

hari ini, Senin... Tanggal, 23. Bulan, Desember... Tahun, 2019....., telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau Pada Program Studi Akuntansi Semester Akademik 2019..... bagi mahasiswa/i atas nama :

Nama : Martea Arnelita br Sitepu
 NPM : 1515100207
 Program Studi : Akuntansi
 Tanggal Ujian : 23, Desember 2019
 Judul Skripsi Lama : Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten Simalungun di provinsi Sumatera Utara.
 Judul Skripsi Baru : Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten Simalungun di provinsi Sumatera Utara.

Dinyatakan benar bahwa dalam pelaksanaan ujian Meja Hijau mahasiswa tersebut diatas telah terjadi perubahan judul skripsi yang telah dikendaki oleh Panitia Ujian Meja Hijau.

JABATAN	NAMA DOSEN	TANDA TANGAN
Ketua Penguji/ Ketua Program Studi	Junawan SE., M.Si	
Anggota I/ Pembimbing I	Fitri Yanti Panggabean, SE., M.Si	
Anggota II/ Pembimbing II	Oktaviani Khairilab Sihagat SE., M.Si	
Anggota III/ Penguji I	Rusyda Nazbirah Yunus, SS., M.Si	
Anggota IV/ Penguji II	Hernawaty, SE., MM	

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi pemerintah Kabupaten Simalungun. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif dengan sumber data sekunder melalui pengumpulan data tentang pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian adalah Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan meningkat pada dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dan hanya pada DAK dan DBH yang mengalami penurunan pada tahun 2017. Hasil realisasi PAD dan Dana Perimbangan yang besar tidak dapat memberikan pemerataan terutama pada akses jalan yang masih banyak rusak dan rusak parah. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan kurang memberikan kontribusi pada pemerataan pendidikan terutama pada pembangunan sekolah kejuruan, laju pertumbuhan ekonomi pada beberapa lapangan usaha mengalami penurunan hal ini diindikasikan karena akses jalan yang rusak dan rusak parah serta terjadinya penurunan produktifitas angkatan kerja oleh sebab itu laju pertumbuhan ekonomi pada tahun, 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak mengalami peningkatan yang positif secara besar. Pemerintah daerah Kabupaten Simalungun harus benar-benar memperhatikan kualitas jalan sebagai akses utama masyarakat dalam melakukan kegiatan.

Kata Kunci: Pendapatan asli daerah, Dana perimbangan, Pertumbuhan ekonomi

ABSTRACT

This study aims to determine the analysis of local revenue and balance funds in increasing the economic growth of the government of Simalungun District. This study is a descriptive-qualitative study with secondary data sources through data collection on local revenue, balance funds and economic growth. This study used descriptive qualitative method. Original regional income and balance funds increased from 2015-2017 and only in DAK and DBH which decreased in 2017. The large realization of PAD and Balancing Funds could not provide equity, especially for road access which was still heavily damaged and severely damaged. Regional original income and balance funds do not contribute to the even distribution of education, especially in the construction of vocational schools, the rate of economic growth in some businesses has decreased, this is indicated by the access to damaged and severely damaged roads and a decrease in labor force productivity. The local government of Simalungun Regency must really pay attention to the quality of the road as the main access of the community in conducting activities.

Keywords: *Regional original income, balance funds, economic growth*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat mengajukan skripsi ini. Adapun judul yang penulis ajukan adalah sebagai berikut: “ Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten Simalungun”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk ini, bantuan dan bimbingan dari semua pihak sangat saya harapkan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Junawan, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Fitri Yani Panggabean, S.E., M.Si selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan pengetahuan dan saran atau masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.

5. IbuOktarini Khamila S.E., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing, memberi pengetahuan dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
6. Teristimewa untuk orang tua penulis, AyahandaR.Sitepu dan IbundaT.br Sembiring, Keluarga Besarku, Serta adek saya Aldes Natael sitepuyang telah memberikan dorongan motivasi, curahan kasih sayang dan bantuan baik moril maupun material, dan doa yang selalu mengiringi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga dalam penyusunan skripsi ini nantinya dapat berguna bagi penulis dan para pembaca sekalian, dan mudah-mudahan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Medan, November 2019
Penulis

MARTEA AMELITA BR SITEPU

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	9
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	9
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	9
b. Sumber Hukum dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah	11
c. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	12
2. Dana Perimbangan.....	16
a. Pengertian Dana Perimbangan.....	16
b. Dana Alokasi Umum (DAU).....	17
c. Dana Alokasi Khusus (DAK).....	18
d. Dana Bagi Hasil (DBH).....	24
3. Pertumbuhan Ekonomi	29
a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	29
b. Indikator Pertumbuhan Ekonomi.....	32
c. Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi.	35
d. Hasil Pertumbuhan Ekonomi.....	36
4. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	40
B. Penelitian Sebelumnya	41
C. Kerangka Konseptual	44
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	46
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	46
C. Jenis dan Sumber Data	47

D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Teknik Analisis Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	50
1. Gambaran Kabupaten Simalungun.....	50
2. Jumlah Kecamatan Pada Kabupaten Simalungun	51
3. Kependudukan Kabupaten Simalungun	52
4. Sarana Pendidikan Pada Kabupaten Simalungun.....	54
5. Sarana Kesehatan Pada Kabupaten Simalungun	56
6. Infrastruktur Jalan.....	56
7. Tingkat Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Simalungun ...	58
8. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun.....	58
9. Realisasi PAD dan DBH Kabupaten Simalungun Tahun 2015-2017.....	62
B. Pembahasan	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	PAD, DAU dan DBH Simalungun 2015-2017 3
Tabel 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDRB atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Simalungun Tahun 2015-2017..... 4
Tabel 2.1	Mapping Penelitian Sebelumnya 41
Tabel 3.1	Skedul Proses Penelitian 46
Tabel 4.1	Jumlah Kec.Yang Berada Pada Kab. Simalungun 51
Tabel 4.2	Jumlah Kepadatan Penduduk / Kecamatan 53
Tabel 4.3	Jumlah Sarana Pendidikan Pada Kabupaten Simalungun Dari Tingkat SDN, SMPN, SMUN dan SMKN 54
Tabel 4.4	Sarana Kesehatan Pada Kabupaten Simalungun 56
Tabel 4.5	Infrastruktur Jalan 57
Tabel 4.6	Tingkat Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kabupaten Simalungun 58
Tabel 4.7	Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 58
Tabel 4.8	Realisasi PAD dan DBH Kabupaten Simalungun Tahun 2015-2017..... 62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Metode Penelitian.....	44
Gmabr 4.1 Peta Kabupaten Simalungun	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah atau yang sering disingkat otda merupakan bentuk desentralisasi yang lebih konkrit terhadap daerah-daerah yang selama hampir 32 tahun berada pada keadaan sentralisasi dan dengan diterbitkannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah di Indonesia menjadi sebuah langkah riil untuk mewujudkan pembangunan ekonomi di daerah yang diharapkan dapat lebih merata. Prinsip otonomi daerah adalah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya atau dengan kata lain daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat dan dalam kewenangan ini daerah dapat membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan keikutsertaan pemberdayaan masyarakat yang tujuan utamanya adalah terjadinya peningkatan pembangunan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Demi mewujudkan pembangunan ekonomi di daerah maka daerah otonom diberikan sumber anggaran dana yang terdiri atas pendapatan asli daerah dan dana perimbangan antara pusat dengan daerah.

Pendapatan Asli Daerah atau yang lebih sering disingkat PAD menurut Badrudin (2011:99) adalah “Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi

daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi” dan dengan desentralisasi pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggali hasil pendapatan daerah dan melakukan alokasi mandiri untuk memprioritaskan dalam hal pembangunan, dengan harapan dapat memberikan pemerataan pembangunan di segala wilayah daerah dan pemerataan pembangunan ini bertujuan untuk terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi itu sendiri adalah sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.

Dana perimbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pembiayaan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang termasuk ke dalam dana perimbangan adalah dana alokasi umum, dana lokasi khusus dan dana bagi hasil.

Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Djaenuri (2012:103) adalah dana bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dengan demikian akan terselenggara jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Darise (2011:137) adalah merupakan “Biaya yang dialokasikan dari APBN untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, dan khususnya untuk membiayai kebutuhan

sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah” .

Dana Bagi Hasil (DBH) yang menurut Nurcholis (dalam Fauzyny, 2013:39) merupakan “Alokasi yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil” dan dengan menggunakan prinsip *by origin* (daerah penghasil) yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu.

Pada tabel 1.1 terlihat pendapatan asli daerah dan dana perimbangan (DAU, DAK dan DBH) kabupaten Simalungun seperti berikut ini :

Tabel 1.1 PAD dan Dana Perimbangan (DAU, DAK dan DBH) Kabupaten Simalungun Tahun 2015-2017

Thn	PAD (Rp)	DAU (Rp)	DAK (Rp)	DBH PAJAK/BUK AN PAJAK (Rp)	PERTUMBUHAN EKONOMI	
					(%)	(Rp)
2015	111,893,282,770	1,084,973,726,000	99,997,710,000	62,498,327,643	5,3	22.304.110,66
2016	119,980,274,859	1,230,816,187,000	141,590,270,000	68,167,009,000	5,33	23.508.969,96
2017	213,789,585,400	1,297,673,223,692	141,289,961,606	61,601,324,000	5,33	24.715.672,15

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id, 23-4-2019

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, diketahui bahwa perolehan pendapatan asli daerah Kabupaten Simalungun pada tahun 2015 Rp.111,893,282,770 dan pada tahun 2016 adalah Rp. 119,980,274,859 serta pada tahun 2017 yakni Rp. 213,789,585,400, kemudian dana alokasi umum pada tahun 2015 yakni Rp.1,084,973,726,000, pada tahun 2016 Rp. 1,230,816,187,000 dan tahun 2017 Rp. 1,297,673,223,692, berikutnya dana alokasi khusus tahun 2015 adalah Rp. 1,084,973,726,000, tahun 2016 Rp.141,590,270,000 dan tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp. 141,289,961,606 sedangkan dana bagi hasil pada tahun 2015 Rp. 62,498,327,643, pada tahun 2016 Rp. 68,167,009,000 dan tahun 2017 menurun menjadi Rp. 61,601,324,000.

Data pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tahun 2015-2017 yang dilaporkan tersebut diketahui pendapatan dari keempat sumber tersebut sangat besar namun pada tahun 2017 untuk dana alokasi khusus serta dana bagi hasil terjadi penurunan. Berdasarkan pendapatan daerah kabupaten Simalungun yang besar tersebut namun pada tahun 2017 terjadi penurunan untuk dana alokasi khusus dan dana bagi hasil, hal yang ingin dilihat apakah pemerintah Kabupaten Simalungun dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya, selanjutnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDRB atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Simalungun Tahun 2015-2017

Lapangan Usaha	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.7	4.9	4.7
Pertambangan dan Penggalian	7.9	3.1	7.9
Industri Pengolahan	2.8	4.7	2.8
Pengadaan Listrik dan Gas	8.5	4.2	8.5
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7	3.8	7
Konstruksi	8.9	8.9	8.9
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6	6.7	6
Transportasi dan Pergudangan	7.2	7.3	7.2
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.7	3.9	4.7
Informasi dan Komunikasi	5.5	5.6	5.5
Jasa Keuangan dan Asuransi	13.1	5	13.1
Real Estat	5.9	6	5.9
Jasa Perusahaan	4	4.1	4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.1	2.3	7.1
Jasa Pendidikan	6.5	7.1	6.5
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.6	5.2	1.6
Jasa lainnya	6.2	6.8	6.2

Sumber :Simalungunkab.bps.go.id, 23-4-2019

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pada pertambangan penggalian mengalami penurunan pada tahun 2016, industri pengolahan mengalami penurunan pada tahun 2017, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mengalami penurunan pada tahun 2017, transportasi dan

perdagangan mengalami penurunan pada tahun 2017, informasi dan komunikasi mengalami penurunan pada tahun 2017, jasa perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2017, jasa pendidikan mengalami penurunan pada tahun 2017, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya mengalami penurunan pada tahun 2017, oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pertumbuhan ekonomi dengan judul “Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten Simalungun”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Terjadi penurunan dana alokasi khusus pada tahun 2017 dibanding pada tahun 2016, yakni selisih penurunan sebesar 0,003%
- b. Terjadinya penurunan dana bagi hasil pada tahun 2017 dibanding pada tahun 2016 yakni selisih penurunan sebesar 0,11%
- c. Penurunan dana alokasi khusus dari tahun 2016 dan tahun 2017 dengan selisih 0,3% dan dana bagi hasil pada tahun 2016 dan tahun 2017 dengan selisih 0,6% dapat mengakibatkan sulitnya pemerintah daerah kabupaten Simalungun meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di daerahnya.
- d. Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha mengalami penurunan pada beberapa lapangan usaha, seperti industri pengolahan dari tahun 2016 sebesar 4,7% menjadi 2,8% pada tahun 2017.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar peneliti tidak jauh dari masalah yang diinginkan, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada analisis pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten Simalungun provinsi Sumatera Utara.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pendapatan asli daerah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten Simalungun provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimanakah dana perimbangan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten Simalungun provinsi Sumatera Utara ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pendapatan asli daerah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten Simalungun provinsi Sumatera Utara
- b. Untuk mengetahui dana perimbangan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten Simalungun provinsi Sumatera Utara

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan wahana melatih, menulis dan berpikir secara ilmiah dengan menerapkan teori dan literatur yang ada. Terutama pada bidang pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

b. Bagi Kabupaten

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat juga sebagai deksripsi pendapatan asli daerah dandana perimbangan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

c. Bagi Universitas Pancabudi Medan

Sebagai referensi bagi para akademis atau peneliti lain yang tertarik untuk mengadakan penelitian di bidang permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Christian Donarich Natanael (2017) Univeristas Komputer Indonesia, Bandung yang berjudul : “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Survei Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode 2011 - 2015) sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada :

1. Variabel Penelitian

Penelitian sebelumnya Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan variabel penelitian ini Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian sebelumnya dilakukan di provinsi Jawa Barat sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Simalungun provinsi Sumatera Utara

3. Waktu Penelitian

Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2017 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019.

4. Model Penelitian

Penelitian sebelumnya menggunakan teknik regresi linier berganda dan penelitian ini menggunakan teknik deskriptif.

Perbedaan tempat penelitian, waktu penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan teknik analisis data menjadikan perbedaan yang membuat keaslian penelitian ini dapat terjamin dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Panggabean (2019:25) desentralisasi merupakan bentuk otonomi daerah yang riil untuk mewujudkan pembangunan ekonomi di daerah yang diharapkan dapat lebih merata. Prinsip otonomi daerah adalah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya atau dengan kata lain daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat dan dalam kewenangan ini daerah dapat membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan keikutsertaan pemberdayaan masyarakat yang tujuan utamanya adalah terjadinya peningkatan pembangunan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Demi mewujudkan pembangunan ekonomi di daerah maka daerah otonom diberikan sumber anggaran dana yang terdiri atas pendapatan asli daerah dan dana perimbangan antara pusat dengan daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan pendapatan asli dari daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Menurut Djaenuri (2012:88) pendapatan asli daerah adalah “Sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”Selanjutnya menurut Halim dan Kusufi (2012:96) pendapatan asli daerah adalah “Merupakan semua penerimaan

daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah“, selain pengertian menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pendapatan asli daerah, berikut ini pengertian menurut beberapa ahli:

1) Menurut Mardiasmo (2011:1)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2) Menurut Badrudin (2011:99)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

3) Menurut Nurcholis (dalam Muhtarom,2015:660)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah.

4) Menurut Fitri Yani Panggabean (2019:37)

Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum memberikan kontribusi pada pemerataan pendidikan terutama pada pembangunan sekolah kejuruan.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dihasilkan dari daerah atas potensi atau sumber yang sah dan dibagi kepada empat komponen yakni pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah

b. Sumber Hukum dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai pembangunan daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakaian jasa tersebut.

Menurut Damang (dalam Duwila,et.al,2017:170) dengan adanya penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah dan kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas.

c. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

1. Pajak daerah

Menurut Yani (dalam Hananto, 2018:18) pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh perorangan atau suatu badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang didapat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlakudan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dan menurut Mardiasmo (2011: 32) pajak daerah adalah “pajak yang dipungut oleh daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya”.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis objek pajak daerah provinsi dan kabupaten/kota dibedakan menjadi :

a. Objek pajak daerah provinsi, meliputi :

- (1) Pajak kendaraan bermotor
- (2) Bea balik nama kendaraan bermotor
- (3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- (4) Pajak kendaraan di atas air.
- (5) Pajak air di bawah tanah.
- (6) Pajak air permukaan

b. Jenis objek pajak untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- (1) Pajak hotel
- (2) Pajak restoran
- (3) Pajak hiburan
- (4) Pajak reklame
- (5) Pajak penerangan jalan
- (6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- (7) Pajak parkir.

2. Retribusi Daerah.

Menurut Darise (2011:136) retribusi daerah adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah dibedakan antara menjadi :

a. Jenis retribusi daerah provinsi adalah sebagai berikut :

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- (3) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- (4) Retribusi pengujian kapal perikanan.

b. Jenis retribusi daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- (3) Retribusi penggantian biaya cetak KTP.

- (4) Retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil.
- (5) Retribusi pelayanan pemakaman
- (6) Retribusi pelayanan pengabuan mayat.
- (7) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (8) Retribusi pelayanan pasar.
- (9) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- (10) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (11) Retribusi penggantian biaya cetak peta.
- (12) Retribusi pengujian kapal perikanan.
- (13) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (14) Retribusi jasa usaha pasar, grosir atau pertokoan.
- (15) Retribusi jasa usaha tempat pelelangan.
- (16) Retribusi jasa usaha terminal.
- (17) Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir.
- (18) Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (19) Retribusi jasa usaha penyedotan kakus.
- (20) Retribusi jasa usaha rumah potong hewan.
- (21) Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal.
- (22) Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga.
- (23) Retribusi jasa usaha penyebrangan di atas air.
- (24) Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair.
- (25) Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah.
- (26) Retribusi izin mendirikan bangunan.
- (27) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

(28)Retribusi izin gangguan.

(29)Retribusi trayek.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan.

Menurut Halim dan Kusufi (2012: 98) kekayaan daerah yang dipisahkan adalah “Kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan secara mandiri oleh daerah”. Menurut Darise (2011:136) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Berdasarkan hal ini maka perusahaan daerah merupakan salah satu dari pendapatan daerah yang modalnya secara keseluruhan atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan bagi daerah yang mempunyai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Perusahaan Daerah Air minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecamatan, Pasar dan lain sebagainya merupakan bagian dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Menurut Halim dan Kusufi (2012: 98) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Lain-lain pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan

daerah yang tidak dapat diklasifikasikan dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan yang termasuk dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Hasil pengelolaan kekayaan yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2. Dana Perimbangan

a. Pengertian Dana Perimbangan

Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan dana perimbangan adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi” dan dana perimbangan ini bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang termasuk ke dalam dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Darise (2011:137) Dana alokasi umum merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Selanjutnya menurut Mardiasmo (2011:144) dana alokasi umum dimaksudkan untuk menjaga pemerataan dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, sehingga dalam pembagian Dana Alokasi Umum perlu memperhatikan potensi daerah, kebutuhan pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah di daerah dan ketersediaan APBN. Dana Alokasi Umum mempunyai fungsi sebagai faktor pemerataan fiskal. Faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya Dana Alokasi Umum untuk setiap daerah adalah celah fiskal (*fiscal gap*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Prinsip alokasi Dana Alokasi Umum adalah bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhannya kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya jika potensi daerah kecil sementara kebutuhannya besar, maka daerah tersebut akan menerima alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif besar.

Berikutnya menurut Djaenuri (2012:103) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dengan demikian akan terselenggara jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55

tahun 2005 disebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan bahwa dana alokasi umum yang akan diperoleh daerah dipengaruhi oleh alokasi dasar yakni jumlah PNS yang ada di daerah serta celah fiskal yakni jumlah penduduk yang ada di daerah, luas wilayah daerah, pendapatan asli daerah yang dihasilkan setiap tahun dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh dari pemerintah pusat setiap tahunnya. Berikutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2005 bahwa ketentuan pelaksanaan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah ditetapkan sekurang-kurangnya 26 % dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN, kemudian Dana alokasi Umum (DAU) untuk daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan masing masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas kemudian Dana alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan serta porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan

sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Menurut Darise (2014: 137).

Daerah-daerah yang menerima Dana Alokasi khusus adalah daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, terutama ketentuan yang mengatur kekhususan suatu daerah serta karakteristik daerah yang meliputi daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal atau terpencil, daerah rawan banjir dan longsor, serta daerah yang termasuk dalam daerah ketahanan pangan. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara atau departemen teknis terkait dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana atau prasarana pada masing-masing bidang atau kegiatan yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus.

Selanjutnya menurut Darise (2011:137) Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan “biaya yang dialokasikan dari APBN untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, dan khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah”. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan antara

keuangan pusat dan keuangan daerah dijelaskan bahwa “Dana Alokasi Khusus selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang ditujukan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.”Persyaratan untuk daerah dalam memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- 1) Daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak (BHP) Sumber Daya Alam(SDA), Dana alokasi Umum (DAU), Pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.
- 2) Daerah menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari kegiatan yang diajukan (dikecualikan untuk DAK dari Dana Reboisasi).
- 3) Kegiatan tersebut memenuhi kriteria teknis sektor/kegiatan ditetapkan oleh menteri /instansi terkait

Selanjutnya daerah harus memenuhi kriteria pengalokasian dana alokasi khusus yang meliputi :

- 1) Kriteria umum

Sesuai dengan Undang – Undang No 33 Tahun 2004 pada pasal 40 dinyatakan bahwa alokasi DAK mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kriteria umum dihitung untuk melihat kemampuan APBD untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi belanja pegawai (APBD - Belanja pegawai)

2) Kriteria Khusus

Ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Karakteristik daerah yang meliputi: untuk provinsi, terdiri dari: daerah tertinggal, daerah pesisir atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata) dan untuk kabupaten/kota terdiri dari: daerah tertinggal, daerah pesisir atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata.

3) Kriteria Teknis

Kriteria teknis dirumuskan oleh kementerian negara atau departemen teknis terkait. Kriteria teknis tersebut dicerminkan dengan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi saran prasarana pada masing-masing bidang/kegiatan yang akan di danai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Kriteria teknis berdasarkan lingkup kegiatan yaitu: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, prasarana pemerintahan, keluarga berencana, kehutanan, perdagangan, perumahan dan pemukiman, listrik pedesaan, sarana kawasan, transportasi pedesaan, keselamatan transportasi, dan sarana prasarana.

Arah Dana Alokasi Khusus menurut Direktorat jenderal Perimbangan Keuangan bahwa arah dana alokasi khusus, yakni:

a. Dana Alokasi Khusus Pendidikan

Dana ini diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu, yang diperuntukkan bagi SD, baik negeri maupun swasta, yang diprioritaskan pada daerah tertinggal,

daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, dan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

b. Dana Alokasi Khusus Kesehatan

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin serta masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, melalui peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan.

c. Dana Alokasi Khusus Keluarga Berencana

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan program KB, sarana dan prasarana pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)/advokasi Program KB, sarana dan prasarana pelayanan di klinik KB.

d. Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Dana ini diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa, serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional.

e. Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Irigasi

Dana ini diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana sistem irigasi termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi urusan kabupaten/kota dan provinsi

khususnya di daerah lumbung pangan nasional dan daerah tertinggal dalam rangka mendukung program peningkatan ketahanan pangan.

f. Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum dan meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

g. Dana Alokasi Khusus Pertanian

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di tingkat usaha tani, dalam rangka meningkatkan produksi guna mendukung ketahanan pangan nasional.

h. Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, dan pengawasan, serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

i. Dana Alokasi Khusus Prasarana Pemerintahan Daerah

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan public, serta digunakan untuk pembangunan/perluasan/rehabilitasi total gedung kantor/bupati/walikota, dan pembangunan/perluasan/rehabilitasi total gedung kantor DPRD, dengan tetap memperhatikan kriteria perhitungan alokasi Dana Alokasi Khusus.

j. Dana Alokasi Khusus Lingkungan hidup

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang lingkungan hidup melalui

peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan dan sistem informasi pemantauan kualitas air, pengendalian pencemaran air, serta perlindungan sumber daya air di luar kawasan hutan.

k. Dana Alokasi Khusus Kehutanan

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), meningkatkan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai, pemantapan fungsi hutan lindung, Taman Hutan Raya (TAHURA), hutan kota, serta pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan termasuk operasional kegiatan penyuluhan kehutanan.

l. Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Perdesaan

Dana ini ditujukan khusus untuk daerah tertinggal, dan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan prasarana dan sarana dasar untuk memperlancar arus angkutan penumpang, bahan pokok, dan produk pertanian lainnya dari daerah pusat-pusat produksi di perdesaan ke daerah pemasaran.

m. Dana Alokasi Khusus Perdagangan

Dana ini diarahkan untuk menunjang penguatan sistem distribusi nasional melalui pembangunan sarana dan prasarana perdagangan yang terutama berupa pasar tradisional di daerah perbatasan, daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah tertinggal/terpencil, serta daerah pasca bencana.

d. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) menurut Nurcholis (dalam Fauzyani, 2013:39) merupakan “alokasi yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil” dan dengan menggunakan prinsip *by origin* (daerah penghasil) yang

dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan “dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah”. Kemudian dalam Undang – Undang Nomor.33 Tahun 2004 pada pasal 11, Dana Bagi Hasil (DBH) dibagi menjadi dua yaitu :

1) Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP)

Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) terdiri atas :

a) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN)

dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian sebagai berikut:

- (1) 8% untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- (2) 12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan

b) Cukai Hasil Tembakau

Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau dibagikan kepada daerah sebesar 2% dengan rincian sebagai berikut:

- (1) 0,6% untuk provinsi yang bersangkutan;
- (2) 0,8% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan; dan
- (3) 0,6% untuk pemerataan kabupaten/kota lainnya.

2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBHSDA)

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBHSDA) adalah penerimaan bukan pajak yang terdiri atas penerimaan dari :

a) Sektor Kehutanan

Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kehutanan terdiri atas:

- (1) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)

Bagian daerah dari penerimaan negara iuran hak pengusahaan hutan dibagi dengan perincian:

- (a) 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan.
- (b) 64% untuk daerah kabupaten/ kota penghasil.

(2) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Bagian daerah dari penerimaan negara provisi sumber daya hutan dibagi dengan perincian:

- (a) 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan.
- (b) 32% untuk daerah kabupaten/ kota penghasil.
- (c) 32% untuk daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan dan bagian kabupaten/kota dibagikan dengan porsi yang samabesar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

(3) Dana Reboisasi (DR)

Bagian daerah dari penerimaan yang berasal dari dana reboisasi sebesar 40% dibagi kepada kabupaten/kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

b) Sektor Pertambangan Umum

Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan umum terdiri atas:

- (1) Penerimaan iuran tetap (*land-rent*), adalah seluruh penerimaan iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan umum, eksplorasi, dan eksploitasi pada suatu wilayah kuasa pertambangan.

Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum dari Iuran Tetap sebesar 80% yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:

(a) 16% untuk provinsi yang bersangkutan; dan

(b) 64% untuk kabupaten/kota penghasil

(2) Penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*), adalah iuran produksi yang diterima negara dalam hal pemegang kuasa pertambangan eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan eksplorasi yang diberikan kepadanya serta atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi (*royalty*) satu atau lebih bahan galian.

Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan Umum dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi sebesar 80% yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:

(a) 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan.

(b) 32% untuk daerah kabupaten/ kota penghasil.

(c) 32% untuk daerah kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

c) Sektor Perikanan

Dana Bagi Hasil (DBH) sektor perikanan berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan. Bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) sektor perikanan sebesar 80% dibagikan dengan porsi yang samabesar untuk seluruh kabupaten/kota.

d) Sektor Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan negara dari pertambangan minyak bumi dibagi sebagai berikut. Daerah imbalan 85% untuk pemerintah pusat dan 15% untuk daerah. Bagian daerah dibagi dengan rincian:

- (1) 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan.
- (2) 6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil.
- (3) 6% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.

Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan minyak bumi yang dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

e) Sektor Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan negara dari pertambangan gas bumi dibagi sebagai berikut. Daerah imbalan 70% untuk pemerintah pusat dan 30% untuk daerah. Bagian daerah dibagi dengan rincian:

- (1) 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan.
- (2) 12% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil.
- (3) 12% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.

Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan Gas Bumi yang dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

f) Sektor Pertambangan Panas Bumi

Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan panas bumi berasal dari setoran bagian pemerintah atau iuran tetap dan iuran produksi. Bagian penerimaan daerah untuk sektor pertambangan panas bumi sebesar 80% dengan rincian sebagai berikut:

- (1) 16% untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- (2) 32% untuk kabupaten/kota penghasil;
- (3) 32% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

3. Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi bersangkutan-paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sementara pembangunan mengandung arti yang lebih luas. Proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumber daya produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Namun demikian pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengan kenyataan adanya pertambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhannya akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Adanya keterkaitan yang erat antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, ditunjukkan pula dalam sejarah munculnya teori-teori pembangunan ekonomi. dalam kepustakaan pembangunan ekonomi pasca Perang Dunia II terdapat lima pendekatan utama dalam aliran pemikiran tentang teori-teori pembangunan, yaitu model pertumbuhan bertahap

linier, model pembangunan struktural, model ketergantungan internasional, kontrarevolusi pasar bebas neoklasik dan model pertumbuhan endogen.

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan peningkatan PDB/PDBR. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya menaikkan produktivitas. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk akan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Jika pemda menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat produktivitas penduduk. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin dalam pendapatan per kapita.

Pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets (dalam Panggabean,2019:26) adalah “Kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya”. Selanjutnya menurut Boediono (dalam Fauzini, 2013:20) adalah “Proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang” dan menurut Panggabean (2019:26) pertumbuhan ekonomi adalah “Suatu proses terjadinya kenaikan nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil, dengan kata lain tumbuhnya perekonomian atau berkembang apabila terjadi pertumbuhan *output* riil disuatu daerah”.Berikutnya menurut para ahli lain pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

1) Menurut Putong (2013:1)

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatnya pendapatan perkapita) dalam suatu periode perhitungan tertentu.

2) Menurut Sukirno (2014:9)

Pertumbuhan ekonomi adalahSebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

b. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi skala nasional dapat diketahui dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) dan untuk skala daerah menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan menurut Sukirno (2013:34) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan “jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah”. Tujuan PDB dan PDRB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu dan Pendekatan PDRB menurut Arifin (dalam Panggabean, 2017:11) adalah dengan :

1. Metode langsung

Metode langsung dapat digunakan tiga macam pendekatan, yakni :

(a) Pendekatan Produksi

PDRB dihitung melakukan akumulasi nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah/provinsi dalam jangka tertentu dan dikelompokkan ke dalam sembilan lapangan usaha:

- (1) Pertanian
- (2) Pertambangan dan penggalian
- (3) Industri pengolahan
- (4) Listrik dan gas air, bersih

- (5) Bangunan
- (6) Perdagangan, Hotel dan Restoran
- (7) Angkutan dan komunikasi
- (8) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
- (9) Jasa-jasa.

(b) Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan adalah jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/region dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun.

(c) Pendekatan pengeluaran

Pendekatan Pengeluaran adalah jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stock dan ekspor neto, di dalam suatu wilayah/region dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Penghitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa diproduksi.

2. Metode tidak langsung/Metode alokasi

Metode tidak langsung dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah dengan :

(a) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Atas dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan jumlah seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun yang

dinilai dengan harga di tahun yang bersangkutan. NTB atas dasar harga berlaku yang didapat dari pengurangan Nilai Produksi Bruto (NPB/*output*) dengan biaya masing-masing dinilai atas dasar harga berlaku. NTB menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi yang dihasilkan dan tingkat perubahan harga dari masing-masing kegiatan, subsektor dan sektor. Menurut BPS perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku dengan menghitung harga yang berlaku pada barang dan jasa pada setiap tahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menunjukkan :

- (1) Kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah tertentu
- (2) Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula.
- (3) Menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu wilayah tertentu.

(b) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Penghitungan atas dasar harga konstan pengertiannya sama dengan penghitungan atas dasar harga berlaku, tetapi penilaiannya dilakukan dengan harga suatu tahun dasar tertentu. Nilai Tambah Bruto (NTB) atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi saja. Pengaruh perubahan harga telah dihilangkan dengan cara menilai dengan harga suatu tahun dasar tertentu. Menurut BPS memperoleh PDRB atas dasar harga konstan dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan

nilai pada tahun ke $n-1$, dikalikan dengan 100 persen maka laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Penghitungan atas dasar harga konstan berguna untuk melihat Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau sektoral dan untuk melihat perubahan struktur perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menunjukkan :

- (1) Menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/ setiap sektor ekonomi dari tahun ke tahun.
- (2) Mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri, perdagangan antar pulau/antar provinsi.

c. Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2013:34) faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah :

1. Investasi

Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja

2. Pertambahan barang modal

Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi

3. Perkembangan teknologi

Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Selanjutnya menurut Sukirno (2013:35) faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah dan menurut Sukirno (2013:35) pengeluaran pemerintah adalah suatu “tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Menurut Sukirno (2013:36) dalam mengambil keputusan, pemerintah memiliki banyak pertimbangan untuk mengatur pengeluaran, pemerintah tidak hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijaksanaan tersebut. Besarnya penerimaan atau pendapatan pemerintah akan sangat mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah hal ini dikarenakan pendanaan pengeluaran pemerintah sendiri berasal dari pendapatan daerah atau pinjaman.

d. Hasil Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (dalam Siagian, 2018:13) hasil pertumbuhan ekonomi tidak akan terlihat tanpa adanya hasil riil berupa pertumbuhan dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang ekonomi di wilayahnya, begitu juga tanpa pertumbuhan ekonomi maka pembangunan suatu wilayah tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Hasil pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan dengan:

a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan semakin sejahtera jika setidaknya keluaran perkapita meningkat. Tingkat kesejahteraan tersebut diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita. Makin tinggi PDB

perkapita maka perekonomianpun terus bertumbuh dan peningkatan PDB perkapita tersebut harus lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk. Jika pertambahan penduduk suatu wilayah adalah 2%, maka pertumbuhan PDB harus lebih tinggi dari 2%.

b. Kesempatan kerja

Kesempatan kerja mengikat manusia adalah salah satu faktor terpenting dalam proses produksi maka dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja akan meningkat bila keluaran meningkat dan untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu pabrik, pihak pabrik tentu harus menambah jumlah tenaga kerjanya sehingga apabila jumlah keluaran meningkat, itu mengindikasikan adanya peningkatan kesempatan kerja.

c. Perbaikan Distribusi Pendapatan

Perbaikan distribusi pendapatan yang baik adalah yang makin merata dan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi maka yang terjadi bukanlah pemerataan pendapatan tetapi justru pemerataan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan perbaikan distribusi pendapatan bila memenuhi setidaknya dua syarat, yaitu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktifitas. Semakin luasnya kesempatan kerja dan meningkatnya produktifitas maka akses rakyat untuk memperoleh penghasilan makin besar.

d. Persiapan Bagi Tahapan Kemajuan

Perekonomian dalam sebuah daerah dapat diibaratkan sebagai seorang manusia. Manusia tidak dapat menjadi besar dan dewasa dalam tempo yang sebentar, begitu pula dengan perekonomian suatu daerah, bahkan waktu yang dibutuhkan untuk mendewasakan sebuah perekonomian jauh lebih lama bila

dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan manusia untuk menjadi dewasa. Pengalaman dari negara maju, menunjukkan bahwa Negara maju membutuhkan waktu sekitar tiga sampai lima abad untuk memodernisasi perekonomiannya. Kenyataan di atas mengisyaratkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan tangga untuk mencapai tahapan kemajuan ekonomi selanjutnya sebab sebuah perekonomian yang mampu terus-menerus tumbuh dalam jangka panjang, umumnya telah memiliki kemampuan untuk menjadi modern dan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang dibutuhkan bukan saja tenaga kerja, bahan baku maupun teknologi melainkan juga pemerintah daerah yang mampu melahirkan ide-ide modern.

Berikutnya menurut Sukirno (dalam Siagian, 2018:13) hasil pertumbuhan ekonomi adalah:

1) Terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan semakin sejahtera jika setidaknya keluaran perkapita meningkat. Tingkat kesejahteraan tersebut diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita. Makin tinggi PDB perkapita maka perekonomianpun terus bertumbuh dan peningkatan PDB perkapita tersebut harus lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk. Jika pertumbuhan penduduk suatu wilayah adalah 2%, maka pertumbuhan PDB harus lebih tinggi dari 2%.

2) Terbukanya kesempatan kerja

Kesempatan kerja mengikat manusia adalah salah satu faktor terpenting dalam proses produksi maka dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja akan meningkat bila keluaran meningkat dan untuk meningkatkan kapasitas

produksi suatu pabrik, pihak pabrik tentu harus menambah jumlah tenaga kerjanya sehingga apabila jumlah keluaran meningkat, itu mengindikasikan adanya peningkatan kesempatan kerja.

3) Distribusi Pendapatan Membaik

Perbaikan distribusi pendapatan yang baik adalah yang makin merata dan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi maka yang terjadi bukanlah pemerataan pendapatan tetapi justru pemerataan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan perbaikan distribusi pendapatan bila memenuhi setidaknya dua syarat, yaitu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktifitas. Semakin luasnya kesempatan kerja dan meningkatnya produktifitas maka akses rakyat untuk memperoleh penghasilan makin besar.

4) Kesiapan Tahapan Kemajuan

Perekonomian dalam sebuah daerah dapat diibaratkan sebagai seorang manusia. Manusia tidak dapat menjadi besar dan dewasa dalam tempo yang sebentar, begitu pula dengan perekonomian suatu daerah, bahkan waktu yang dibutuhkan untuk mendewasakan sebuah perekonomian jauh lebih lama bila dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan manusia untuk menjadi dewasa. Pengalaman dari negara maju, menunjukkan bahwa Negara maju membutuhkan waktu sekitar tiga sampai lima abad untuk memodernisasi perekonomiannya. Kenyataan di atas mengisyaratkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan tangga untuk mencapai tahapan kemajuan ekonomi selanjutnya sebab sebuah perekonomian yang mampu terus-menerus tumbuh dalam jangka panjang, umumnya telah memiliki kemampuan untuk menjadi modern dan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang

dibutuhkan bukan saja tenaga kerja, bahan baku maupun teknologi melainkan juga pemerintah daerah yang mampu melahirkan ide-ide modern.

4. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan direvisi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah maka berlaku juga kewenangan dalam pengelolaan sumber pendapatannya yang salah satunya adalah pengelolaan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan adanya kewenangan fiskal pada pemerintah daerah maka pemerintah daerah harus berpacu dalam meningkatkan jumlah penerimaan PAD karena dengan terus meningkatnya PAD maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa bergantung dengan pusat. Pemerintah daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi pada setiap tahunnya maka akan memberikan kontribusi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan mencerminkan kinerja perekonomian suatu wilayah dimana pertumbuhan ekonomi mengindikasikan keberhasilan pembangunan suatu wilayah dan hal ini dapat diketahui dari besaran nilai Product Domestic Regional Bruto (PDRB).

Sumber pendapatan lain selain PAD bagi daerah adalah dana perimbangan. Dana perimbangan yang terdiri dari komponen yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). DAU dari pemerintah pusat adalah untuk pemerataan pembangunan agar tidak terjadinya kesenjangan dan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang terjamin kemudian DBH

merupakan bagian dari daerah yang bersumber dari penerimaan pajak dimana besarnya sudah diatur dalam undang-undang. Dana perimbangan ditujukan untuk terjadinya pemerataan pembangunan pada suatu wilayah dan dengan terjadinya pembangunan maka turut juga meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Selanjutnya dalam mengukur kontribusi PAD dan dana perimbangan dipergunakan formulasi sebagai berikut:

PAD/Pertumbuhan ekonomi kemudian DAU/pertumbuhan ekonomi, DAK/Pertumbuhan ekonomi dan DBH/Pertumbuhan ekonomi.

B. Mapping Penelitian Sebelumnya

Adapun penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya

No	Nama/Asal dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Daud Wido Immanuel Panggabean (Universitas Lampung, 2017)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2015	X1=Pendapatan Asli Daerah X2=Dana Perimbangan	Pertumbuhan Ekonomi	Regresi	PAD, DBH, dan DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, variabel DAK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

2	Wulan Fauzyani (UIN Syarif Hidayatullah, 2013)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2011	X1=Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2=Dana Alokasi Khusus (DAK) X3=Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	Pertumbuhan Ekonomi	Fixed Effect Model (FEM).	Pengaruh desentralisasi fiskal di provinsi Jawa Tengah. Artinya pada saat derajat desentralisasi fiskal belum terlampau tinggi, maka kebijakan desentralisasi fiskal akan membawa pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pada derajat desentralisasi fiskal terlampau tinggi, kebijakan desentralisasi fiskal justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi.
3	Christian Donarich Natanael (Universitas Komputer Indonesia, 2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Survei Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode 2011 - 2015)	X1=Pendapatan Asli Daerah X2=Dana Alokasi Umum	Pertumbuhan Ekonomi	Regresi	Pendapatan Asli Daerah memiliki korelasi positif dan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada kota/kabupaten di provinsi Jawa Barat periode 2011-2015 dan Dana Alokasi Umum memiliki korelasi positif dan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada

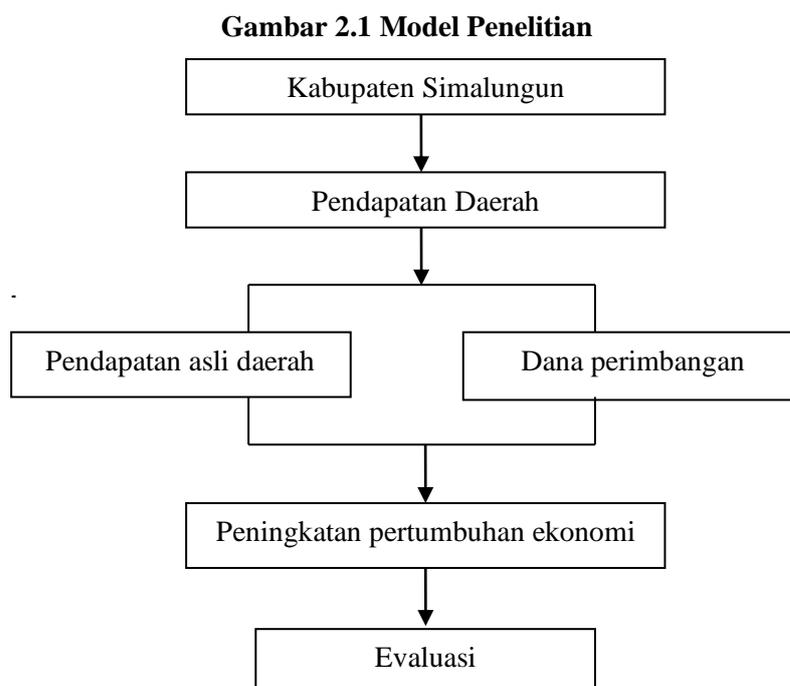
						kota/kabupaten di provinsi Jawa Barat periode 2011-2015
4.	Lily Kusumawati dan I Gusti Bagus Wiksuana (Universitas Udayana, 2018)	Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali.	X1=Pendapatan Asli Daerah X2=Dana Alokasi Umum X3=Dana Alokasi Khusus X4=Dana Bagi Hasil	Pertumbuhan Ekonomi	Regresi	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali.
5.	Dharma Putra Dedy (USU, 2016)	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Di Provinsi Sumatera	X=Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi	Regresi	Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara pada periode 2012-2014.
6.	Asmaul Husna (Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2013)	Pengaruh Pendapatan Asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau	X1=Pendapatan asli daerah X2= dana perimbangan	Pertumbuhan Ekonomi	Regresi	Retribusi daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

7	Fitri Yani Panggabean (Universitas Pancabudi Medan, 2019)	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten Simalungun	X1=Pendapatan Asli Daerah X2=Dana Alokasi Umum	Pertumbuhan Ekonomi	Deskriptif Kualitatif	Pendpaatan asli daerah dan dana alokasi umum memberikan kontribusi pada pemerataan pendidikan terutama pada pembangunan sekolah kejuruan
---	---	---	---	---------------------	-----------------------	--

Sumber :Diolah Penulis,2019

C. Kerangka Konseptual

Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah dan dengan sumber pendapatan ini bertujuan untuk menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi daerah selanjutnya untuk mendapatkan gambaran tentang PAD, DAU, dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi maka dibuatlah sebuah kerangka konseptual sebagai berikut:



Sumber : Diolah Penulis, 2019

Pendapatan daerah Kabupaten Simalungun yang terdiri dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan diharapkan memberikan laju pertumbuhan ekonomi pada berbagai bidang karena tujuan dari sebuah pembangunan adalah meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah oleh sebab itu dengan adanya pendapatan asli daerah serta dana perimbangan yang ada pada kabupaten Simalungun perlu dilakukan evaluasi apakah terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:29) metode deskriptif “metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas” dan menurut Gozali (2013:12) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau penghubungan dengan variabel yang lain.”

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. **Tempat Penelitian** : Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara
2. **Waktu Penelitian** : April 2019 s.d Juli 2019

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian Tahun Ajar 2018/2019

No	NAMA KEGIATAN	KEGIATAN															
		April				Mei				Juni				Juli			
		2019				2019				2019				2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Riset Awal / Pengajuan Judul	■															
2	Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■	■	■								
3	Perbaikan / ACC Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■				
4	Pengolahan Data													■	■	■	■
5	Penyusunan Skripsi													■	■	■	■
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■
7	ACC Skripsi																
8	Sidang Meja Hijau																■

Sumber : Rencana Penelitian 2019

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui :

a. Studi pustaka

Yaitu data dikumpulkan dari buku teori, karya ilmiah, jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data pertumbuhan ekonomi dan gambaran kabupaten Simalungun dari www.simalungunkab.bps.go.id, selanjutnya data pertumbuhan ekonomi sumatera utara dari www.bps.go.id dan data PAD, DAK, DAU DBH dari www.djpk.kemenkeu.go.id

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data melalui dokumen tertulis terutama berupa dokumen, artikel, karya ilmiah dan buku-buku untuk mendapatkan data sekunder. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan djpk kemenkeu untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis deskriptif kualitatif menurut Sugiyono (2015: 335) adalah “Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman (Sugiyono,2015: 337) yaitu :

1. Pengumpulan informasi

Pengumpulan informasi melalui pengumpulan data dari djpk kemenkeu dan badan pusat statistik Simalungun

2. Penyajian data

Sajian data merupakan rangkaian informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang disusun secara logis dan sistematis yang mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian. Sajian data merupakan deskripsi mengenai kondisi rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan dalam penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman atas gambaran fenomena yang ada pada obyek penelitian.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Data yang diperoleh sejak awal penelitian sebenarnya sudah merupakan suatu kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula belum jelas dan masih bersifat sementara, kemudian meningkat sampai pada tahap kesimpulan yang mantap, yaitu pernyataan yang telah memiliki landasan yang kuat karena telah melalui proses analisa data. Pada tahap ini adalah mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dari proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa

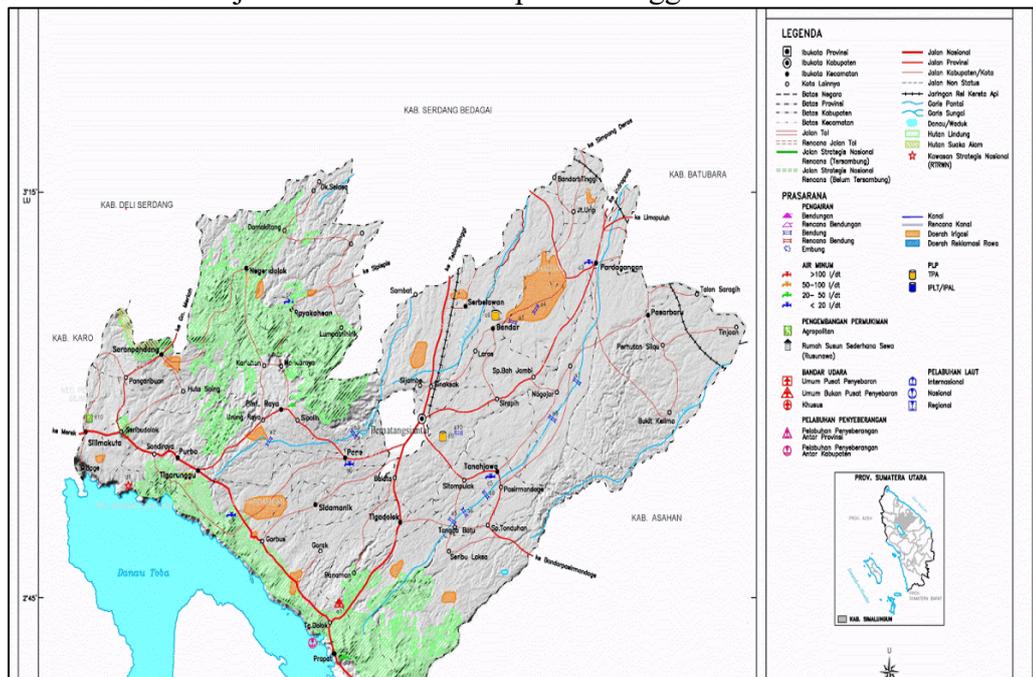
tinjauan ulang pada catatan-catatan dilapangan sehingga data dapat diuji validitasnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Kabupaten Simalungun

Kabupaten Simalungun memiliki luas wilayah 4.372,50 Km² atau 6,12 persen dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Simalungun berbatasan dengan 8 (delapan) Kabupaten/ Kota yaitu sebelah utara Kabupaten Simalungun berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai dan Deli Serdang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Batu Bara serta dengan Kota Pematang Siantar yang kelilingi oleh wilayah Kabupaten Simalungun. Secara astronomis Kabupaten Simalungun terletak diantara 02^o36"- 03^o18" Lintang Utara dan 98^o32"-99^o35" Bujur Timur dan berada pada ketinggian 0 – 1400 meter.



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Simalungun

Sumber : www.simalungunkab.go.id

Kabupaten Simalungun dilihat dari topografinya bervariasi yaitu dataran tinggi terletak di bagian Barat Daya, Barat dan Barat laut serta dataran rendah di bagian Utara, Timur dan Tenggara dengan kemiringan lereng antara 0-40 % yang berada pada ketinggian antara 20-1400 m di atas permukaan laut. Kondisi kemiringan lahan yang terdapat di kabupaten Simalungun dikategorikan ke dalam 4 kelompok, yaitu:

- a) Dataran rendah dengan kelerengn 0-2 % seluas 117.558 Ha.
- b) Dataran landai dengan kelerengn 2-15% seluas 179.613 Ha.
- c) Daerah perbukitan dengan kelerengn 15-40% seluas 100.984 Ha
- d) Daerah pegunungan dengan kelerengn >40% seluas 59.805Ha.

Ketinggian lahan Kabupaten Simalungun diatas permukaan laut berada antara 0-1400 meter, wilayah tertinggi berada di Kecamatan Raya, Dolok Silou, Girsang Sipangan Bolon, Dolok Pardamean, Haranggaol Horison, Purba, Pamatang Silimakuta dan Silimakuta, sedangkan wilayah terendah dengan ketinggian antara 0-200 meter berada di Kecamatan Bandar dan Bandar Masilam.

2. Jumlah Kecamatan Pada Kabupaten Simalungun

Jumlah kecamatan dan luas wilayah kecamatan pada kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.1 Jumlah Kecamatan Yang Berada Pada Kabupaten Simalungun

No	Nama Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Silimakuta	74,16
2	Pamatang Silimahuta	79,68
3	P u r b a	172,71
4	Haranggaol Horison	40,97
5	Dolok Pardamean	103,04
6	Sidamanik	80,88
7	Pamatang Sidamanik	137,80

8	Girsang Sipangan Bolon	129,89
9	Tanah Jawa	174,33
10	Hatonduhan	336,26
11	Dolok Panribuan	148,62
12	Jorlang Hataran	93,70
13	P a n e i	77,96
14	Panombeian Panei	73,74
15	R a y a	331,83
16	Dolok Silou	302,66
17	Silou Kahean	228,74
18	Raya Kahean	204,89
19	Tapian Dolok	119,89
20	Dolok Batu Nanggar	106,91
21	S i a n t a r	73,99
22	Gunung Malela	96,74
23	Gunung Maligas	51,39
24	Hutabayu Raja	191,43
25	Jawa Maraja Bah Jambi	38,97
26	Pamatang Bandar	88,16
27	Bandar Huluan	107,33
28	B a n d a r	100,69
29	Bandar Masilam	91,22
30	Bosar Maligas	285,43
31	Ujung Padang	228,49
Kabupaten Simalungun		4,372,50

Sumber : hasil Data Sekunder, 2019

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, diketahui bahwa jumlah kecamatan yang berada pada kabupaten Simalungun adalah 31 kecamatan dengan kecamatan Hatonduhan sebagai kecamatan terluas yakni 336,26 Km² serta kecamatan terkecil adalah kecamatan jawa maraja bah jambi yakni 38,97 Km²

3. Kependudukan Kabupaten Simalungun

Jumlah penduduk Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Jumlah Kepadatan Penduduk / Kecamatan

N o	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laki- Laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
1	Silimakuta	15.777	7.994	7.783	102,71
2	Pamatang Silimahuta	10.834	5.432	5.402	100,56
3	P u r b a	24.027	12.109	11.918	101,60
4	Haranggaol Horison	5.080	2.558	2.522	101,43
5	Dolok Pardamean	16.201	8.193	8.008	102,31
6	Sidamanik	27.676	13.620	14.056	96,90
7	Pamatang Sidamanik	16.659	8.253	8.406	98,18
8	Girsang Sipangan bahbolon	14.886	7.369	7.517	98,03
9	Tanah Jawa	47.646	23.324	24.322	95,90
10	Hatonduhan	21.366	10.782	10.584	101,87
11	Dolok Panribuan	18.363	9.015	9.348	96,44
12	Jorlang Hataran	15.667	7.769	7.898	98,37
13	P a n e i	22.199	10.860	11.339	95,78
14	Panombeian Panei	19.547	9.869	9.678	101,97
15	R a y a	32.260	16.240	16.02	101,37
16	Dolok Silou	14.411	7.277	7.134	102,00
17	Silou Kahean	17.555	8.828	8.727	101,16
18	Raya Kahean	17.830	9.011	8.819	102,18
19	Tapian Dolok	41.154	20.845	20.309	102,64
20	Dolok Batu Nanggar	40.663	20.555	20.108	102,22
21	S i a n t a r	66.304	32.971	33.333	98,91
22	Gunung Malela	34.767	17.245	17.522	98,42
23	Gunung Maligas	27.923	13.986	13.937	100,35
24	Hutabayu Raja	29.808	14.632	15.176	96,42
25	Jawa Maraja Bah Jambi	22.021	10.800	11.221	96,25
26	Pamatang Bandar	31.679	15.584	16.095	96,83
27	Bandar Huluan	26.473	13.264	13.209	100,42
28	B a n d a r	68.958	34.051	34.907	97,55
29	Bandar Masilam	24.876	12.325	12.551	98,20
30	Bosar Maligas	40.591	20.322	20.269	100,26
31	Ujung Padang	41.288	20.711	20.577	100,65
Kabupaten Simalungun		854.489	425.794	428.695	99,32

Sumber : hasil Data Sekunder, 2019

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, penduduk Kabupaten Simalungun atas dasar proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 854.489 jiwa yang terdiri atas 425.794

jiwa penduduk laki-laki dan 428.695 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Simalungun mengalami pertumbuhan sebesar 0,60 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 0,61 persen dan penduduk perempuan sebesar 0,59 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,32. Kepadatan penduduk di Kabupaten Simalungun tahun 2016 mencapai 195 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk / rumah tangga empat orang. Kepadatan Penduduk di 31 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Siantar dengan kepadatan sebesar 896 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Dolok Silou sebesar 48 jiwa/Km².

4. Sarana Pendidikan Pada Kabupaten Simalungun

Sarana pendidikan adalah fasilitas pendidikan yang disediakan oleh Kabupaten Simalungun agar tercapainya tujuan pembangunan sumber daya manusia. Adapun jumlah sarana pendidikan dari tingkat Sekolah dasar sampai sekolah menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Sarana Pendidikan Pada Kabupaten Simalungun Dari Tingkat SDN, SMPN, SMUN dan SMKN

No	Nama Kecamatan	Jumlah Sekolah Negeri			
		SDN	SMPN	SMUN	SMKN
1	Silimakuta	12	2	1	-
2	Pamatang Silimahuta	12	1	-	-
3	P u r b a	26	3	1	-
4	Haranggaol Horison	10	-	-	-
5	Dolok Pardamean	22	2	1	-
6	Sidamanik	29	1	1	-
7	Pamatang Sidamanik	19	3	-	-
8	Girsang Sipangan Bolon	17	2	1	-

9	Tanah Jawa	44	3	1	-
10	Hatonduhan	23	2	-	-
11	Dolok Panribuan	35	4	1	-
12	Jorlang Hataran	16	3	-	1
13	P a n e i	25	1	-	-
14	Panombeian Panei	20	2	1	1
15	R a y a	50	4	1	2
16	Dolok Silou	23	1	1	-
17	Silou Kahean	21	2	1	-
18	Raya Kahean	23	2	1	-
19	Tapian Dolok	24	2	-	-
20	Dolok Batu Nanggar	31	1	1	-
21	S i a n t a r	35	2	1	1
22	Gunung Malela	23	2	-	-
23	Gunung Maligas	17	-	-	-
24	Hutabayu Raja	35	3	1	-
25	Jawa Maraja Bah Jambi	20	2	-	-
26	Pamatang Bandar	24	1	1	-
27	Bandar Huluan	19	1	2	-
28	B a n d a r	35	1	-	-
29	Bandar Masilam	18	2	-	-
30	Bosar Maligas	39	2	1	1
31	Ujung Padang	27	2	1	-
Kabupaten Simalungun		774	59	20	6

Sumber : hasil Data Sekunder, 2019

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, sarana pendidikan yang tersedia di kabupaten Simalungun untuk tingkat SD negeri sebanyak 774 sekolah, pada tingkat SMP jumlah sekolah negeri yaitu 59 sekolah, berikutnya untuk tingkat SMA jumlah sekolah negeri sebanyak 20 sekolah dan tingkat SMK ada 6 sekolah SMK Negeri. Sebaran Sekolah Dasar Negeri (SDN) terbanyak berada di kecamatan Raya yakni sebanyak 50 Sekolah dan terkecil berada di kecamatan Silimakuta dan Pamatang Silimahuta masing-masing sebanyak 12 sekolah. Selanjutnya untuk SMP Negeri sebaran terbanyak berada di kecamatan Dolok Panribuan dan kecamatan Raya masing-masing 4 SMP Negeri. Berikutnya untuk SMU Negeri terbanyak berada

di kecamatan Bandar Huluan dan yang tidak memiliki SMU Negeri yakni kecamatan Pamatang Silimahuta, Haranggaol Horison, Pamatang Sidamanik, Hatonduhan, Jorlang Hataran, Panei, Tapian Dolok, Gunung Malela, Gunung Maligas, Jawa Maraja Bah Jambi, Bandar dan Bandar Masilam serta untuk SMK Negeri yang terbanyak hanya di kecamatan Raya yakni 2 Sekolah kemudian masing – masing hanya ada 1 SMK Mengeri di Kecamatan Jorlang Hataran, Panombeian Panei, Siantar dan Bosar Maligas.

5. Sarana Kesehatan Pada Kabupaten Simalungun

Sarana kesehatan adalah fasilitas kesehatan yang disediakan oleh kabupaten Simalungun bagi warganya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Sarana Kesehatan Pada Kabupaten Simalungun

No	Nama Kecamatan	Sarana Kesehatan					
		RSU	Rumah Bersalin	Puskesmas	Pustu	Poskesdes	Posyandu
1	Silimakuta	-	-	1	2	3	19
2	Pamatang Silimahuta	-	-	1	2	1	21
3	Purba	-	-	1	6	6	38
4	Haranggaol Horison	-	-	1	1	5	16
5	Dolok Pardamean	-	-	1	6	6	31
6	Sidamanik	-	-	1	5	2	33
7	Pamatang Sidamanik	-	-	1	6	4	35
8	Girsang Sipangan Bolon	1	-	1	2	1	23
9	Tanah Jawa	1	-	1	7	4	66
10	Hatonduhan	-	-	1	6	2	37
11	Dolok Panribuan	-	-	1	8	3	43
12	Jorlang Hataran	-	-	1	2	3	33
13	Panei	-	-	1	4	3	56
14	Panombeian Panei	-	-	1	4	6	39
15	Raya	1	-	1	10	9	67
16	Dolok Silou	-	-	1	7	4	23
17	Silou Kahean	-	-	1	6	5	33
18	Raya Kahean	-	-	1	5	2	37

19	Tapian Dolok	1	-	1	5	3	51
20	Dolok Batu Nanggar	1	-	1	7	4	59
21	S i a n t a r	-	-	2	5	2	33
22	Gunung Malela	-	-	1	5	7	41
23	Gunung Maligas	-	-	1	5	5	29
24	Hutabayu Raja	-	-	2	9	6	56
25	Jawa Maraja Bah Jambi	-	-	1	3	5	29
26	Pamatang Bandar	-	-	1	8	2	58
27	Bandar Huluan	-	-	1	5	2	48
28	B a n d a r	2	-	1	9	6	92
29	Bandar Masilam	-	-	1	4	5	43
30	Bosar Maligas	-	-	1	5	7	73
31	Ujung Padang	-	1	1	9	8	50

Sumber : hasil Data Sekunder, 2019

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, sebaran Rumah Sakit Umum tidak merata namun Puskesmas sudah ada diseluruh kecamatan begitu juga pustu, poskesdes dan posyandu.

6. Infrastruktur Jalan

Jalan sebagai akses utama bagi masyarakat untuk beraktifitas atau berkegiatan telah dibangun oleh Kabupetan Simalungun seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Infrastruktur Jalan

Panjang Jalan Kabupaten Simalungun	Keadaan Jalan			
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1,803,78	395,83	411,63	544,57	451,75

Sumber : hasil Data Sekunder, 2019

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa panjang jalan kabupaten simalungun adalah 1,803, 78 Km yang dalam keadaan baik adalah 395,83 Km, dalam keadaan sedang adalah sepanjang 411,63 Km, sedangkan rusak sepanjang 544,57 Km serta yang rusak berat sepanjang 451,75 Km.

7. Tingkat Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Simalungun

Tingkat Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6 Tingkat Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kabupaten Simalungun

Pengeluaran Per Kapita	2015	2016	2017
Makanan	Rp.396.386,00	Rp 438.026,00	Rp 438.026,00
Non Makanan	Rp.305.387,00	Rp.329.137,00	Rp.329.137,00

Sumber : hasil Data Sekunder, 2019

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, diketahui konsumsi penduduk Simalungun Rp 438.026) merupakan konsumsi makanan di tahun 2016 sementara pada tahun 2015 mencapai Rp 396.386, hal ini menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi dari non makanan ke makanan sementara itu pada tahun 2017 data yang digunakan adalah data konsumsi tahun 2016. Peningkatan pengeluaran ini identik dengan peningkatan pendapatan penduduk.

8. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun

Lapangan usaha adalah sumber pendapatan masyarakat Kabupaten Simalungun dn lapangan usaha dapat dari berbagai sektor, lapangan usaha masyarakat Kabuapten Simalungun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan

Lapangan Usaha	2015		2016		2017	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12 589 550,08	4.7	13 201 969,74	4.9	13 784 501,50	4.7
Pertambangan dan Penggalian	52 315,46	7.9	53 954,13	3.1	57 396,03	7.9
Industri Pengolahan	2 415 837,49	2.8	2 529 290,14	4.7	2 641 694,08	2.8

Pengadaan Listrik dan Gas	18 971,49	8.5	19 760,85	4.2	20 828,06	8.5
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17 989,38	7	18 668,64	3.8	19 703,31	7
Konstruksi	1 870 893,62	8.9	2 037 563,00	8.9	2 184 292,21	8.9
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 993 840,00	6	3 196 069,35	6.7	3 431 459,09	6
Transportasi dan Pergudangan	334 294,99	7.2	358 767,75	7.3	386 975,86	7.2
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	197 969,77	4.7	205 646,48	3.9	215 618,07	4.7
Informasi dan Komunikasi	156 538,07	5.5	165 234,50	5.6	174 892,68	5.5
Jasa Keuangan dan Asuransi	218 837,92	13.1	229 737,63	5	232 623,65	13.1
Real Estat	192 199,64	5.9	203 715,98	6	215 040,36	5.9
Jasa Perusahaan	18 336,99	4	19 094,27	4.1	20 262,79	4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	903 957,81	7.1	932 458,50	2.3	967 267,28	7.1
Jasa Pendidikan	221 197,52	6.5	230 003,72	7.1	248 483,52	6.5
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	79 553,18	1.6	83 728,96	5.2	89 818,18	1.6
Jasa lainnya	21 827,26	6.2	23 306,31	6.8	24 815,48	6.2
PDRB/GRDP	22 304 110,66		23 508 969,96		24 715 672,15	

Sumber : hasil Data Sekunder, 2019

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, diketahui bahwa pada pertambangan penggalian mengalami penurunan pada tahun 2016, industri pengolahan mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 2,8 dibandingkan pada tahun 2016 yang sebesar 4,7, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 6 dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 6,7 penurunan terjadi 0,6, transportasi dan pergudangan mengalami penurunan pada tahun 2017 dengan nilai sebesar 7,3 dibandingkan tahun sebelumnya yang bernilai 7,3, informasi dan komunikasi mengalami penurunan pada tahun 2017 dengan nilai 5,5 dibandingkan nilai tahun sebelumnya yakni 5,6, jasa perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2017 dengan nilai 4 dibandingkan nilai tahun sebelumnya sebesar 4,1, jasa pendidikan mengalami penurunan pada tahun 2017 dengan nilai 6,5 dibandingkan tahun sebelumnya

yakni 7,1, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya mengalami penurunan sangat signifikan pada tahun 2017 dengan nilai 1,6 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,2.

Selanjutnya jika dilihat kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada pertumbuhan ekonomi dengan jumlah PAD pada tahun 2015 sebesar Rp 111,893,282,770 dan pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan tahun 2015 Rp. 22 304 110,66 maka kontribusi PAD pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 50.167.112.45 atau 4,48%, selanjutnya pada tahun 2016 kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada pertumbuhan ekonomi dengan jumlah PAD pada tahun 2016 sebesar Rp 119,980,274,859 dan pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan tahun 2016 Rp. 23.508.969,96 maka kontribusi PAD pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 51.035.955.66 atau 4,25% dan pada tahun 2017 PAD sebesar Rp 213,789,585,400 dan pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan tahun 2017 Rp. 24 715 672,15 maka kontribusi PAD pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 86.499.604.017 atau 4,04 %.

Kontribusi DAU terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 dengan total DAU tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1,084,973,726,000 dan pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan tahun 2015 Rp. 22 304 110,66 maka DAU berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar Rp. 486.445.634.41 atau 4,48%, berikutnya DAU tahun 2016 sebesar Rp. 1,230,816,187,000 dengan pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan tahun 2016 Rp. 23.508.969,96 maka kontribusi DAU terhadap pertumbuhan ekonomi adalah Rp. 52.355.172.901.84 atau 4,25 % dan DAU tahun 2017 adalah Rp. 1,297,673,223,692 dengan pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan tahun

2017 Rp. 24 715 672,15 maka kontribusi DAU terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 adalah 525.040.636.490.23 atau 4,04%.

Kontribusi DAK terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 dengan total DAK tahun 2015 adalah sebesar Rp99,997,710,000 dan pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan tahun 2015 Rp. 44.833.758.011.851.61 maka DAK berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar Rp. atau 4,48%, berikutnya DAK tahun 2016 sebesar Rp. 141,590,270,000 dengan pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan tahun 2016 Rp. 23.508.969,96 maka kontribusi DAK terhadap pertumbuhan ekonomi adalah Rp.6.022.818.959.780.576 atau 4,25 % dan DAK tahun 2017 adalah Rp. 141,289,961,606 dengan pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan tahun 2017 Rp. 24 715 672,15 maka kontribusi DAK terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 adalah Rp. 5.716.614.168.876.649 atau 4,04%.

Kontribusi DBH terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 dengan total DBH tahun 2015 adalah sebesar 62,498,327,643 dan pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan tahun 2015 Rp. 44.833.758.011.851.61 maka DBH berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar Rp. 1.394.001.538.44 atau 2,23%, berikutnya DBH tahun 2016 sebesar Rp. 68,167,009,000 dengan pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan tahun 2016 Rp. 23.508.969,96 maka kontribusi DBH terhadap pertumbuhan ekonomi adalah Rp.2.899.617.002.19 atau 4,25 % dan DBH tahun 2017 adalah Rp. 61,601,324,000 dengan pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan tahun 2017 Rp. 24 715 672,15 maka kontribusi DBH terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 adalah Rp. 24.923.993.013.88 atau 1,01%.

9. Realisasi PAD dan DBH Kabupaten Simalungun Tahun 2015-2017

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Kabupaten Simalungun pada tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Realisasi PAD dan DBH Kabupaten Simalungun Tahun 2015-2017

Thn	PAD (Rp)	DAU (Rp)	DAK (Rp)	DBH PAJAK/BUKAN PAJAK (Rp)
2015	111,893,282,770	1,084,973,726,000	99,997,710,000	62,498,327,643
2016	119,980,274,859	1,230,816,187,000	141,590,270,000	68,167,009,000
2017	213,789,585,400	1,297,673,223,692	141,289,961,606	61,601,324,000

Sumber : www.simalungunkab.go.id

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, diketahui bahwa PAD dari tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun 2015 Rp.111,893,282,770, pada tahun 2016 Rp. 119,980,274,859 dan pada tahun 2017 Rp.213,789,585,400, Selanjutnya DAU juga mengalami peningkatan dari tahun 2015 Rp. 1,084,973,726,000 menjadi Rp. 1,230,816,187,000 pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi Rp. 1,297,673,223,692, begitu juga pada DAK yang semula hanya 99,997,710,000 pada tahun 2015 menjadi Rp. 141,590,270,000 pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi Rp. 141,289,961,606 serta DBH pada tahun 2015 Rp. 62,498,327,643 dan pada tahun 2016 Rp.68,167,009,000 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 Rp.61,601,324,000. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 5,3% dan mengalami peningkatan sebesar 0,03% pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 tetap sebesar 5,33%.

B. Pembahasan

Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengali sumber-sumber keuangan

lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah yang menurut Halim dan Kusufi (2012:96) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, dan dapat memanfaatkan dana perimbangan dengan baik, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif dan dapat memanfaatkan dana perimbangan dengan baik mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih baik.

Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tentu berpengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah, hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan Daud Wido Panggabean (2017) yang menunjukkan hasil bahwa PAD, DBH, dan DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan karena pendapatan asli daerah dan dana perimbangan merupakan sumber pembelanjaan daerah, maka jika PAD dan dana perimbangan meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu. Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah. Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD. Bila yang terjadi sebaliknya, maka bisa diindikasikan adanya eksploitasi pendapatan asli daerah terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri selanjutnya perlu ditegaskan bahwa keberhasilan peningkatan pendapatan asli daerah hendaknya tidak hanya diukur

dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat.

Kontribusi Pendapatan asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan namun untuk DBH tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya tetapi kembali meningkat pada tahun 2017. Kontribusi PAD dan dana perimbangan yang seharusnya memberikan dampak positif yang besar bagi laju pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, namun ternyata pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Simalungun tidak tumbuh positif terlalu besar, hal ini karena ada beberapa faktor yang kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah diantaranya adalah perbaikan jalan sebagai akses utama bagi masyarakat, baik sebagai pelaku usaha maupun konsumen. Jalan sebagai infrastruktur fisik adalah pendukung utama dalam menggerakkan perekonomian baik secara regional maupun nasional dan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Simalungun peran infrastruktur dalam kegiatan perekonomian sangat penting, dimana untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan stabil tentu harus diiringi dengan pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien.

Berikutnya selain kualitas dan ketersediaan infrastruktur fisik yang memadai maka perhatian yang tidak kalah pentingnya juga kepada ketersediaan sumber daya manusia atau tenaga kerja handal serta memiliki produktifitas yang baik, hal ini tentu harus didukung dengan pembekalan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja melalui pemerataan pendidikan kejuruan, berdasarkan hasil yang diperoleh diketahui bahwa sekolah menengah

kejuruan di Simalungun hanya berjumlah 6 Sekolah, dari dan alokasi khusus yang diberikan seharusnya dapat memberikan peningkatan jumlah sekolah kejuruan karena terindikasi bahwa banyak pengusaha menggunakan tenaga kerja dari luar daerah kabupaten Simalungun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah Kabupaten Simalungun maka didapati kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan adalah faktor yang penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kontribusi Pendapatan asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan namun untuk kontribusi DBH tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya tetapi kembali meningkat pada tahun 2017. Hasil realisasi PAD dan Dana Perimbangan yang besar tidak dapat memberikan pemerataan terutama pada akses jalan yang masih banyak rusak dan rusak parah.
2. Laju pertumbuhan ekonomi pada beberapa lapangan usaha mengalami penurunan hal ini diindikasikan karena akses jalan yang rusak dan rusak parah serta terjadinya penurunan produktifitas angkatan kerja, hal ini karena pendapatan asli daerah dan dana perimbangan kurang memberikan kontribusi pada pemerataan pendidikan terutama pada pembangunan sekolah kejuruan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan terhadap hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Simalungun harus benar-benar memperhatikan kualitas jalan sebagai akses utama masyarakat dalam melakukan kegiatan, baik kegiatan pendidikan, bekerja dan lainnya.
2. Pemerintah daerah harus dengan sungguh-sungguh dalam melakukan pemerataan pendidikan terutama pendidikan kejuruan sebagai peningkatan produktifitas angkatan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnita, V., & Aulia, A. (2020). Prekdisi Pertumbuhan Laba Dalam Rasio Keuangan Pada PT JAPFA COMFEED TBK. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(1), 115-122.
- Badrudin, Rudi. (2011). *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Barus, M. D. B., & Azzahra, A. S. (2020). Analisis Aplikasi Dan Penerapan Matematika Pada Ilmu Ekonomi Fungsi Permintaan Dan Penawaran. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 103-114.
- Barus, M. D. B., & Hakim, A. (2020). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika melalui Metode *Practice Rehearsal Pairs* pada Siswa SMA Al-Hidayah Medan. *Biormatika: Jurnal ilmiah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan*, 6(1), 74-78.
- Chrisna, H. (2019). Pengaruh Perilaku Belajar, Pengendalian Diri, Motivasi, Empati, Keterampilan, Dan Kepercayaan Diri Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 87-100.
- Chrisna, H., Karin, A., & Hasibuan, H. A. (2020). Analisis Sistem Dan Prosedur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah Pada PT. BANK BRI Syariah Cabang Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 156-166.
- Darise, Nurlan. (2011). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Dharma, Putra Dedy. (2016). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *USU*.
- Djaenuri, Aries. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Duwila, Kalangi & Kawung.(2017). Tinjauan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Alokasi Umum dan Pengalokasian Anggran Belanja Modal Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*
- Dwilita, H., & Sari, P. B. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Keluarga dan Literasi Keuangan Wanita di Dusun 20 Desa Klambir Lima Kebun. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 1(3), 184-197.
- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi *English For Specific Purpose* (ESP) Di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 190-201.

- Fauzyny, Wulan. (2013). *Analisis Pengaruh PAD, DAK dan DBH Pajak / Bukan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2011*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: teori konsep dan aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hananto, Fian, Dwi. (2018). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung (2012-2016)*. Yogyakarta: UII.
- Hernawaty, H., Chrisna, H., & Junawan, J. (2020). Analisa Penggunaan *Forward Contract Hedging* pada Nilai Ekspor Barang Ekonomi Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 1(3), 95-109.
- Hoesada. (2016). *Akuntansi Pemerintahan (Bunga Rampai)*. Jakarta: Salemba.
- Kusumawati, L., & Wiksuana, I. G. (2018). *Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali*. Bali: Universitas Udayana.
- Husna, Asmaul. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. *JEMI*.
- Maisyarah, R. (2018). *Analysis of the Determinants Competition Oligopoly Market Telecommunication Industry in Indonesia*. *KnE Social Sciences*, 760-770.
- Manullang, M., & Pakpahan, M. (2014). *Metodelogi penelitian, Proses Penelitian Praktis*. Bandung: Citapustaka Media.
- Mardiasmo. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Muhtarom, Abid. (2015). Analisis PAD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode 2010-2015. *Jurnal Ekbis*.
- Nasution, A. P. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 15-25.
- Nasution, A. P. (2019). Implementasi *E-Budgeting* Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1-13.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162.
- Nasution, D. A. D. (2019, August). *The Effect of Implementation Islamic Values and Employee Work Discipline on The Performance of Moslem Religious Employees at Regional Financial Management in the North Sumatera Provincial Government*. In *International Halal Conference & Exhibition 2019 (IHCE)* (Vol. 1, No. 1, pp. 1-7).

- Natanael, Christian, Donarich. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Survei Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode 2011 - 2015)*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Panggabean, Fitri, Yani.(2019).*Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten Simalungun. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*
- Panggabean, Daud, Wido. (2017). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2015*. Lampung: Universitas Lampung.
- Purba, R. B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Putong, Iskandar.(2013). *Economics Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra.
- Rusiadi, Rahmat.(2014).*Metode Penelitian manajemen, akuntansi dan ekonomi pembangunan*. Medan: USU Press
- Ritonga, M. (2018). Faktor Manajemen Biaya Dan Manajemen Pemasaran Terhadap Pendapatan Melalui Intensitas Produksi Pada Ukm Industri Rumahan Di Kota Binjai. *JUMANT*, 8(2), 68-78.
- Sadono Sukirno.(2013). *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sari, M. N. (2020). Pengaruh *Return On Asset, Financial Leverage, Dan Trading Volume* Terhadap *Initial Return*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 18-27.
- Sari, P. B. (2020). Analisis Opini *Going Concern* Pada Perusahaan Farmasi di Bursa Efek Indonesia (*Multiple Correlation Method*). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(2), 189-196.
- Siagian, Erlinda. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2016. Yogyakarta: UNY.
- Siahaan. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed method)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2014). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Kebijakan*. Jakarta: Bina Grafika.

Sunusi, Dewi. (2014). Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Pada Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara Tahun 2001-2010. *Berkala Efisiensi*.

Tarigan, Robinson. (2012). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yunus, R. N. (2020). Analisis Multimodal Pada Iklan Layanan Masyarakat. *JUMANT*, 12(2), 83-89.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 jenis objek pajak daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah .

www.djpk.kemenkeu.go.id

www.simalungunkabbps.go.id

www.bps.go.id